

RINGKASAN

Dandy Davical Latuperissa
210510103

Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara)
(Dr. Amrizal, S.H., LL.M dan Fatahillah, S.H., M.Hum)

Pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah dalam konteks penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Wilayah ini tergolong rawan banjir akibat faktor geografis sebagai dataran rendah yang dilalui aliran sungai besar seperti Krueng Keureutoe. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kejadian banjir yang melanda Kecamatan Lhoksukon, menimbulkan kerugian materiil dan imateriil yang signifikan serta memaksa ribuan warga mengungsi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana Pemerintah Daerah menjalankan kewajiban hukumnya dalam penanggulangan bencana, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial riil dan fungsional dalam sistem hukum yang nyata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penanggulangan bencana banjir terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kekurangan alat sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Maka upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mulai dari tindakan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta penyusunan regulasi daerah yang mengatur tata kelola keuangan dalam penanggulangan bencana.

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk memperkuat partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, diharapkan upaya penanggulangan banjir tidak lagi bersifat reaktif dan sporadis, melainkan menjadi program yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Aceh Utara, Pertanggungjawaban Hukum.

SUMMARY

Dandy Davical Latuperissa
210510103

***Legal Accountability of Regional Government
in Flood Disaster Management Based on Law
Number 24 of 2007 Concerning Disaster
Management (Research Study in Lhoksukon
District, North Aceh Regency)***
**(Dr. Amrizal, S.H., LL.M dan Fatahillah,
S.H., M.Hum)**

Legal responsibility of the Regional Government in the context of flood disaster management in Lhoksukon District, North Aceh Regency, with reference to Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This area is classified as flood-prone due to geographical factors as a lowland crossed by large rivers such as Krueng Keureutoe. This research is motivated by the flood incident that hit Lhoksukon District, causing significant material and immaterial losses and forcing thousands of residents to evacuate. The main objective of this study is to analyze the extent to which the Regional Government carries out its legal obligations in disaster management, as well as to identify existing obstacles and solutions.

This study uses an empirical legal research method, which is based on primary data, namely data obtained directly from the community as the primary source through field research activities. The research approach used in this study is a sociological legal approach, namely identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution within a real legal system.

Based on the research results, it can be concluded that the legal accountability of the North Aceh District Government in flood disaster management faces several obstacles, such as budget limitations, lack of facilities and infrastructure, and low public awareness and active participation in protecting the environment. Therefore, the efforts made by the North Aceh District Government include preventive measures such as outreach and education to the community, construction of flood control infrastructure, and the preparation of regional regulations governing financial management in disaster management.

It is recommended to the North Aceh District Government to strengthen the participation and active role of the community in every stage of disaster management, starting from mitigation, preparedness, to rehabilitation and reconstruction. Thus, it is hoped that flood management efforts will no longer be reactive and sporadic, but rather become a systematic, planned, and sustainable program.

Keywords: *Regional Government, North Aceh, Legal Accountability.*